

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH BERBASIS RASIO PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS MEBIDANGROKAT)**

Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si¹

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si²

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

Local governments are very important to evaluate the budget realization report, with the aim of being able to measure the financial performance of the local government each period, so that the Government is encouraged to improve its performance the following year. The government of Regency and city in North Sumatra in the case of Mebidangrokat showed that the ratio of regional financial independence is very significant in increasing the ratio of regional expenditure to PDRB. Local governments should be able to conduct regional financial management planning with the 3E program, as each region has a different geographical, cultural and culture form so that the government's goal in regional financial management is on target.

Keywords: *Expenditure District, PDRB and Local Revenue.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mewujudkan melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. Berikut ini data LRA dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2017(Dalam Rupiah)

| Kabupaten/Kota | Pendapatan Daerah | Belanja Daerah |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Medan | 4.492.575.344.846 | 4.444.526.676.000 |
| Binjai | 1.019.170.635.604 | 898.217.575.000 |
| Deli Serdang | 3.332.337.760.502 | 3.590.667.779.000 |
| Serdang Bedagai | 1.586.778.177.706 | 1.483.195.992.000 |
| Langkat | 2.311.283.153.445 | 2.454.078.083.000 |
| Karo | 1.463.205.993.000 | 1.775.838.516.000 |

Sumber : BPS Sumut.go.id, 2018

Berdasarkan data yang diperoleh untuk sementara bahwa realisasi pendapatan semakin meningkat seiring dengan belanja daerahnya. Akan Tetapi besarnya belanja sama dengan pendapatan maka disimpulkan pemerintah tersebut tidak dapat menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya untuk Medan, Deli serdang, Langkat dan Karo. Meskipun belanja yang semakin meningkat dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

Menurut Marijana Badun (2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan penting untuk mengetahui kapan sistem keuangan berubah lebih

baik atau buruk. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana transfer yang digunakan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara sebagai belanja daerah dapat memperbaiki prasarana dan sarana seperti infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan dianalisis adalah mencakup komposisi APBD, baik penerimaan seperti pendapatan, dan alokasi belanja. Analisis mengenai penerimaan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah agar dapat menjadi pemasukan daerah. Sedangkan analisis belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah melakukan alokasi sumberdaya untuk aktivitas pembangunan.

Seperti pendapat Magdalena K (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya jumlah pengangguran. Penelitian ini penting dilakukan sebagai salah satu pengukuran kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Jadi peneliti ingin menganalisis bagaimana dana yang berasal dari pemerintah pusat digunakan untuk membiayai belanja daerah, apakah dapat berguna secara efisien dan optimal dalam memacu peningkatan pendapatan daerah serta melihat kemandirian dan ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota yaitu Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo dan Langkat di Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara (Mebidangrokat)?
2. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara (Mebidangrokat)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara (Mebidangrokat).
2. Untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara (Mebidangrokat).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Laporan Keuangan

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan dan pertanggung jawaban anggaran. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Satandar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2010).

2. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Bastian, 2010).

3. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

4. Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RaKemKD) :

$$= (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}) \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau propinsi.

Rasio Ketergantungan keuangan daerah (RaKetKD)

$$= (\text{Pendapatan Transfer} / \text{Total Pendapatan daerah}) \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio yang membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Nilai Efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

1. Sangat Efektif : > 100%

2. Efektif : 100%
3. Cukup Efektif : 90% - 99%
4. Kurang Efektif : 75% - 89%
5. Tidak efektif : < 75%

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)

$$= (\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}) \times 100\%$$

d. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio dengan melihat kinerja pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Jika pertumbuhan pendapatan bersifat positif maka cenderung mengalami peningkatan dan sebaliknya.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah (APPD)

$$= \text{Pendapatan Daerah Thn (t)} - \text{Pendapatan Daerah Thn (t-1)} / \text{Pendapatan Daerah Thn (t)}$$

e. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik jika angka rasio mencapai minimal 1 atau 100%.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah (REPD)

$$= (\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} / \text{Target Penerimaan Pajak Daerah}) \times 100\%$$

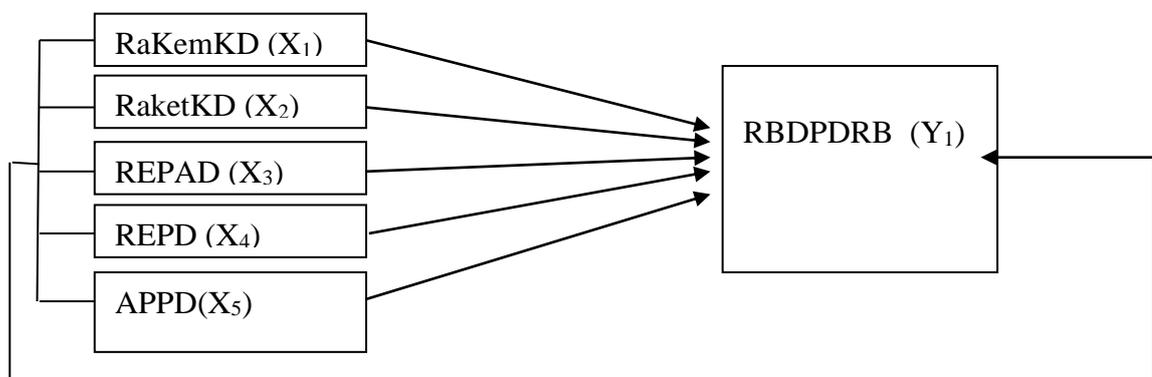
f. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB (RBDPDRB)

Rasio ini membandingkan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Manfaat rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rumus rasio adalah

$$\text{Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \text{Total realisasi Belanja Daerah} / \text{Total PDRB}$$

2.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Belanja daerah sangat mendukung pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan pembangunannya. Tetapi penggunaan belanja daerah yang efisien dapat mewujudkan pembangunan tersebut berjalan lancar. Pembangunan yang optimal tergantung besarnya pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah, terkadang pemerintah kota dan kabupaten masih meminta bantuan dana transfer dari pusat. Karena masih rendahnya pendapatan daerah pemerintah tersebut sehingga tingkat kemandirian daerah itu masih rendah. Peneliti ingin menganalisis pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah dan analisis pertumbuhan pendapatan daerah terhadap rasio belanja daerah terhadap PDRB di pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk melihat dampak analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja

Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan Regresi Berganda, dimana variabel-variabel tersebut diolah dengan program SPSS versi 17. Berikut ini model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$RBDPDRB = \beta_0 + \beta_1 \text{RaKemKD} + \beta_2 \text{RaKetKD} + \beta_3 \text{REPAD} + \beta_4 \text{REPD} + \beta_5 \text{APPD} + e$$

Keterangan:

RBDTPDRB (Y_1) : Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,dan5}$: Koefisien Regresi $X_{1,2,3,4,dan5}$

RaKemKD (X_1): Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

RaKetKD (X_2) : Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

REPAD (X_3) : Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

REPD (X_4) : Rasio Efektivitas Pajak Daerah

APPD (X_5) : Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

e : error

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

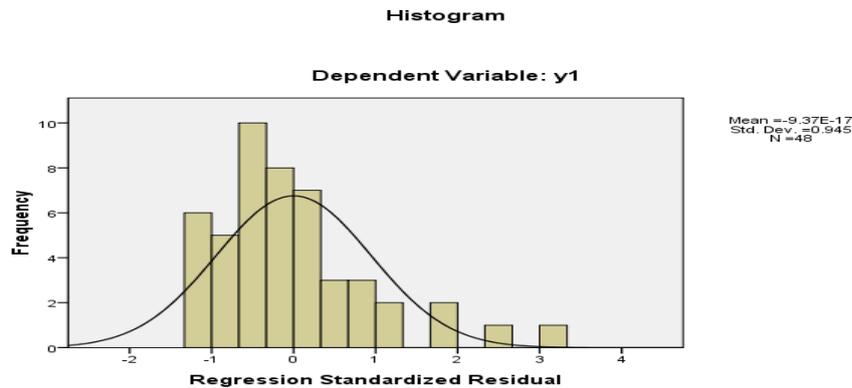
4.1 HASIL PENELITIAN

1. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

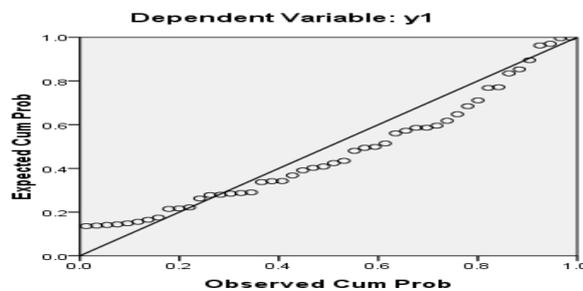
a) Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar histogram dan normal P-P Plot of Regression Standardized Residual adalah



Gambar 4.1 Histogram Model 1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Model 1

Sumber: Lampiran 9

Pada Tampilan grafik histogram, data distribusi nilai residual menunjukkan berdistribusi normal, hal ini dinyatakan pada gambar berbentuk bel yang hampir sempurna

(simetris). Demikian juga pada norma probability plot, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan residual berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian hasil uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnof (*1-sampelK-Stest*). dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut adalah

Tabel 4.1. One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test Model 1

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| N | | | 48 |
| Normal Parameters ^a | Mean | | .0000000 |
| | Std. Deviation | | .04270747 |
| Most Extreme Differences | Absolute | | .128 |
| | Positive | | .128 |
| | Negative | | -.123 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | | .887 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | | .411 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Lampiran 9

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.887, dan tidak signifikan pada $\alpha = 0.05$ (asyp.Sig = 0.411 > 0.05) sehingga hipotesis Ho diterima, yang mengatakan data residual berdistribusi normal. Dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini menunjukkan nilai *cut off* yang umumnya digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 .

Tabel 4.2 Collinearity Statistics Model 1

| Coefficients ^a | | | | |
|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 1.037 | .306 | | |
| x1 | -2.306 | .026 | .361 | 2.767 |
| x2 | .379 | .707 | .370 | 2.704 |
| x3 | -.623 | .537 | .635 | 1.574 |
| x4 | 1.032 | .308 | .619 | 1.616 |
| x5 | .602 | .551 | .977 | 1.023 |

a. Dependent Variable: y1

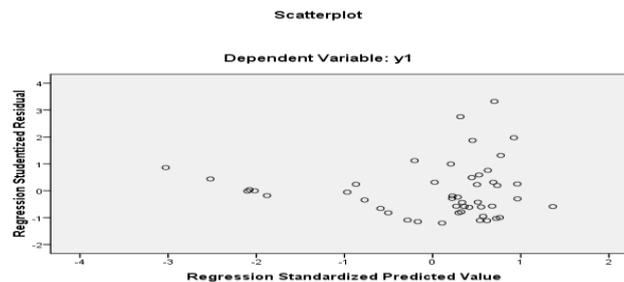
| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Sumber: Lampiran

Hasil uji statistik nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10, dan demikian juga hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini di grafik scatterplots pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Lampiran 9

Gambar 4.3. Scatterplot Model 1

4) Uji Autokorelasi

Mendeteksi uji autokorelasi dengan menggunakan nilai durbin waston dengan kriteria jika angka DW diantara -2 sampai + 2 maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel .4.3 Uji Durbin Waston Model 1

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |
| 1 | .581 ^a | .338 | .259 | .045 | .338 | 4.288 | 5 | 42 | .003 | 1.637 |

a. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1

b. Dependent Variable: y1

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan tabel diatas didapat nilai Durbin Waston sebesar 1.637, maka angka DW berada diantara -2 sampai +2 hal ini tidak terjadi autokorelasi.

b. Pengujian Hipotesis

1) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara adalah

Tabel 4.4. Uji Simultan (Uji F) Model 1

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | .044 | 5 | .009 | 4.288 | .003 ^a |
| | Residual | .086 | 42 | .002 | | |
| | Total | .129 | 47 | | | |

a. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1

Sumber : Lampiran 9

Dari hasil Output SPSS, hasil uji Anova diperoleh F-hitung sebesar 4,288, dengan tingkat probabilitas 0.000. Dengan demikian disimpulkan, $p = 0.000 < \alpha = 0.05$, bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

2) Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah berpengaruh secara parsial terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara adalah

**Tabel 4.5. Uji Parsial (Uji t) Model 1
Coefficients^a**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .079 | .076 | | 1.037 | .306 |
| | x1 | -.092 | .040 | -.482 | -2.306 | .026 |
| | x2 | .025 | .066 | .078 | .379 | .707 |
| | x3 | -.038 | .061 | -.098 | -.623 | .537 |
| | x4 | .050 | .048 | .165 | 1.032 | .308 |
| | x5 | .062 | .103 | .076 | .602 | .551 |

a. Dependent Variable: y1

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan tabel diatas diperoleh model persamaan 1 regresi berganda sebagai berikut;
 $RBDPDRB = 0,79 - 0,09RaKemKD + 0,025RaKetKD - 0,038REPAD + 0,05REPD + 0,06APPD$

Kemudian hasil uji parsial dalam penelitian ini adalah

- Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) dengan t-hitung sebesar -2.306 dengan tingkat probabilitas 0.026. Maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB.
- Variabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2) dengan t-hitung sebesar 0,379 dengan tingkat probabilitas 0.707. Maka Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB.

- c) Variabel Rasio Efektivitas PAD (X_3) dengan t-hitung sebesar -0,623 dengan tingkat probabilitas 0,537. Maka Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh negatif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB.
- d) Variabel Rasio Efektivitas Pajak Daerah (X_4) dengan t-hitung sebesar 0,602 dengan tingkat probabilitas 0,551. Maka Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB.
- e) Variabel Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah (X_5) dengan t-hitung sebesar 1.032 dengan tingkat probabilitas 0,308. Maka Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. adalah

**Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi Model 1
Model Summary^b**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .581 ^a | .338 | .259 | .045 | .338 | 4.288 | 5 | 42 | .003 |

a. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1

b. Dependent Variable: y1

Sumber : Lampiran 9

Dari hasil output diatas, bahwa diperoleh nilai R Square sebesar 0,338 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,259. Hal ini menunjukkan bahwa 25,90 % variabel rasio belanja daerah/PDRB di jelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah sedangkan sisanya 74,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti rasio-rasio keuangan daerah yang belum masuk dalam penelitian ini.

4.2 PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pendapatan daerah di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Masalahnya besarnya belanja sama dengan pendapatan maka disimpulkan pemerintah tersebut tidak dapat menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya. Meskipun belanja yang semakin meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sehingga kita akan melihat sejauhmana kemampuan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara semenjak Otonomi Daerah dari tahun 1999 yang membuktikan bahwa daerah tersebut sudah mandiri yaitu dalam memanfaatkan pendapatan dan belanja memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan berbagai aktivitas seperti perbaikan sarana dan pasarana. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sehingga pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera. Sedangkan secara parsial bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB. Pemerintah Kota dan kabupaten masih rendah dalam membiaya belanja daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB. Berbeda dengan hasil penelitian I Ketut dkk (2015) bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Rasio ketergantungan daerah ini tidak dapat membiayai belanja daerah yang akhirnya untuk menciptakan investasi kearah pembangunan ekonomi. Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB bahwa pengelolaan PAD belum efektif untuk dapat menutupi belanja daerah sehingga target pendapatan asli daerah, pajak daerah dan pendapatan daerah tidak tercapai. Dengan menunjukkan bahwa 25,90 % variabel rasio belanja daerah/PDRB di jelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota dan kabupaten di Sumatera Utara masih belum berhasil dalam otonomi daerah. Maksudnya masih tergantung kepada pusat berupa dana transfer karena minimnya pendapatan daerah yang didapat. Disisi lain alokasi dana pembangunan yang tersedia relatif terbatas maka pemerintah harus dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna untuk pembangunan yang berkelanjutan. Maka Pemerintah harus dapat menumbuhkan investasi baru seluruh daerah pemerintah Kota dan kabupaten di Sumatera Utara melalui pengalokasi dana penerimaan seperti pendapatan, dan efisien belanja pemerintah kabupaten dan kota yang optimal dalam meningkatkan pembangunan daerahnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap rasio belanja daerah/PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial negatif terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera.
3. Dengan nilai 25,90 % variabel rasio belanja daerah/PDRB di jelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah sedangkan sisanya 74,1% dijelaskan oleh faktor rasio-rasio keuangan daerah yang belum masuk dalam penelitian ini.

5.2 SARAN

1. Pemerintah Kota dan Kabupaten perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju perkembangannya.
2. Membuat perencanaan pengelolaan keuangan daerah dengan program 3E (Efisien, Efektif dan Ekonomis) dalam memperdaya sumber daya alam masing-masing pemerintah kota dan kabupaten. Karena setiap pemerintah kota dan kabupaten memiliki

bentuk geografis, kultur dan budaya yang berbeda dimana memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi jika pengelolaan tepat pada sasaran.

3. Memberikan Apresiasi kepada pegawai ASN yang mencapai target pengelolaan keuangan berupa peningkatan tunjangan , insentif, penghargaan dll, dan memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang tidak mampu mencapai target pengelolaan keuangan daerah berupa tidak ada penambahan tunjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Tri.Basuki dan Imamudin, Y.(2015). *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI
- Dian, Sudrajat. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat*. Universitas Pasundan.
- I, Ketut. Arsa dan Nyoman, Djinar.Setiawin. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi BALI Tahun 2006 s.d 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. (2011). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS* 17 Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greydi, N. S, Paulus.K dan Tri, Oldy.R. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Luqman, Khakim. Iwan, Hermawan. Achmad, Solechan. dan VS, Tripriyo.PS.(2011). *Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang.
- Mahmudi. (2009). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mankiw. (2006). *Makro Ekonomi* :Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo.(2007), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI
- Marijana, Badun. (2009). *Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence*. Institute of Public Finance, Zagreb.
- Magdalena, Kludacz. (2012). *Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals*. The College of Economics and Social Sciences in Plock. Warsaw University of Technology Plock, Poland.
- Ni Nyoman.S, Made.S.U dan LN. Mahendra Yasa. (2015). *Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. ISSN: 2337-3067.
- Ni, Luh.Nana.Putri.Ani dan A,A.N.B Dwirandra. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556 .
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putong, Iskandar. (2003). *Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.